BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kekayaan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)" sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfatan (*utilization*) kemampuan/ketrampilan mereka. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada

pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pegembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

a) Tinggi : IPM lebih dari 80,0
b) Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
c) Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
d) Rendah : IPM kurang dari 50,0

Sebagaimana dikutip dari laporan UNDP atau *United Nations Development Programme* (1995), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.

d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report* (HDR) 1995 yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan (UNDP 1995) yaitu:

a. Produktivitas (*Productivity*)

   Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan (*equity*)

   Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.

c. Kesinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

a. Dimensi umur panjang dan sehat.
b. Dimensi pengetahuan.
c. Dimensi kehidupan yang layak (BPS, 2012).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan

indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = {}^{1}/_{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

Di mana :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup
$X_{(2)}$: Indeks pendidikan
$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen dari IPM harus terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk), dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam menganalisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sum_{i=1}^{3} Ii$$

$$Ii = \frac{X_i - Min\ X_i}{Max\ X_i - MinX_i}$$

Di mana :

Ii : Indeks komponen IPM ke-i, dimana i = 1,2,3
X_i : Nilai indikator komponen ke-i
Max X_i : Nilai maksimum X_i
Min X_i : Nilai minimum X_i

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global
Rata-rata lama sekolah	15	0	UNDP menggunakan *Combined Gross Enrollment Ratio*
Daya Beli	732.720[a)]	300.000 360.000[b)]	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang disesuaikan

Sumber: IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2010.

Keterangan: [a)] Perkiraan maksimum pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II tahun 2018.

[b)] Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.

2.2.1. Indeks Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpark* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004 dalam BPS, 2012).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai

batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2.2.2. Indeks Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 (seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100

menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

2.2.3. Indeks Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$
\begin{aligned}
C(I) &= C_{(i)} && \text{jika } C(i) \leq Z \\
&= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
&= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
&\text{dan seterusnya}
\end{aligned}
$$

Di mana:

C (I) = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit.

Z = Batas tingkat pengeluaran yang sudah ditetapkan sebagai Rp 547.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.

Tabel 2.2

Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Perhitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi (1)	Unit (2)	Komoditi (3)	Unit (4)
Beras Lokal	Kg	Pepaya	Kg
Tepung terigu	Kg	Kelapa	Butir
Singkong	Kg	Gula	Ons
Tuna/Cakalang	Kg	Kopi	Ons
Teri	Ons	Garam	Ons
Daging sapi	Kg	Merica	Ons
Ayam	Kg	Mie instan	80 Gram
Telur	Butir	Rokok Kretek	10 batang
Susu kental manis	397 Gram	Listrik	Kwh
Bayam	Kg	Air Minum	M3
Kacang panjang	Kg	Bensin	Liter
Kacang tanah	Kg	Minyak tanah	Liter
Tempe	Kg	Sewa rumah	Unit
Jeruk	Kg		

Sumber: BPS, 2011.

2.3 Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan *basic needs*, maka dapat dihitung "garis kemiskinan konsumsi" dan selanjutnya dapat dihitung persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan konsumsi. Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK),

yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Menurut BPS (Papua Barat Dalam Angka 2011) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita perhari. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Masyarakat miskin berdasarkan pengertian di atas digolongkan sebagai kelompok masyarakat marjinal. Pengertian kemiskinan ini adalah pengertian secara umum yang seringkali banyak ditemukan di negara-negara maju maupun negara sedang berkembang.

Menurut Sharp, *et.al* (1996: 173-191) dalam Mudrajad (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika bepikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

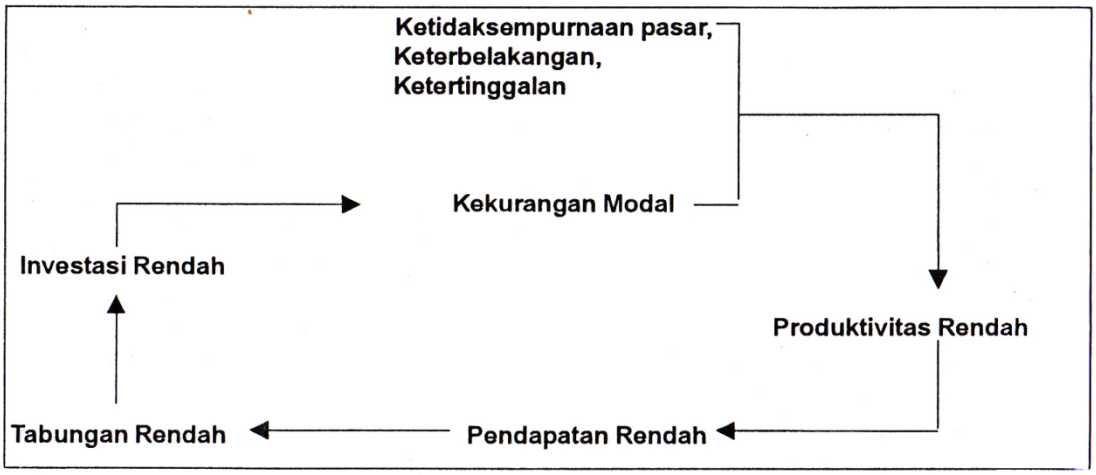

Sumber: Mudrajad, 2006.

2.4. Studi Terkait

Beberapa penelitian terdahulu mengenai indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia telah dilakukan baik itu dengan menggunakan metode deskriptif, statistik maupun ekonometri oleh:

Penelitian Puspandika (2007) mengenai ketimpangan pembangunan yang terjadi antar provinsi di Indonesia dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya pada tahun 2001 sampai dengan 2005. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, *United Nations Support Facility for Indonesia Recovery* (UNSFIR), dan beberapa publikasi penelitian terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Indeks Williamson dan Data Panel dengan pendekatan *fixed Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks

ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia berada pada tingkat yang tinggi. Variabel-variabel yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia melalui regresi data panel adalah PDRB perkapita, angka harapan hidup, pengeluaran riil per kapita, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dari kelima variabel tersebut yang mempengaruhi IPM adalah angka harapan hidup, angka melek huruf ,rata-rata lama sekolah dan yang paling berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran riil per kapita sedangkan PDRB per kapita tidak berpangaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Penelitian Ginting (2008) tentang "Indeks Pembangunan Manusia Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia pada 26 Propinsi pada periode 1996, 1999, 2002, 2004, 2005 dan 2006. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP, dan beberapa publikasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan analisis data menggunakan pendekatan efek-efek acak (*random effect*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Penelitian Sukmaraga (2011) menganalisis mengenai pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah, buku-buku literature, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 Kabupetan dan 6 Kota pada tahun 2006-2008. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dengan bantuan *software Eviews* 4.1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Mirza (2012) bertujuan untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Penelitian ini menggunakan data sekunder 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah

data panel dengan analisis data menggunakan pendekatan *Fixed Effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi panel menunjukkan variabel kemiskinan (KMS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sedangkan pertumbuhan ekonomi (GRWT) dan belanja modal (lnBMOD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian Siletty (2012) mengenai "Kinerja Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku Tahun 2005-2009". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita, dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) bidang pendidikan dan kesehatan tingkat kabupaten/kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Maluku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas. Metode analisis yang digunakan adalah data panel dengn pendekatan *random effect*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan dana APBD kabupaten/kota bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Provinsi Maluku. Sedangkan dana APBD kabupaten/kota bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Provinsi Maluku.